



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3726-3735

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dinamika Kekuasaan dan Kepentingan Politik Dalam Pengelolaan APBN Di Indonesia

Jonathan Brando Saragi¹, Maya Sentia Anjelika Tampubolon², Cornelia Aginta Br Sembiring³, Yanti Masryana Sianturi⁴, Melisa Patrisia Manurung⁵, Sam Deva Nasra Sinulingga⁶
^{1,2,3,4,5,6}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

[1jonathan.saragi2016@gmail.com](mailto:jonathan.saragi2016@gmail.com), [2tampubolonmaya67@gmail.com](mailto:tampubolonmaya67@gmail.com), [3agintacornellia@gmail.com](mailto:agintacornellia@gmail.com),
[4yantisianturi0308@gmail.com](mailto:yantisianturi0308@gmail.com), [5melisapatrisia2@gmail.com](mailto:melisapatrisia2@gmail.com), [6dsam31385@gmail.com](mailto:dsam31385@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika kekuasaan dan kepentingan politik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama periode 2019–2021, ketika pandemi Covid-19 menekan stabilitas ekonomi nasional dan memaksa pemerintah melakukan berbagai penyesuaian fiskal secara cepat. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik dan metode studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan refocusing, realokasi anggaran, serta perluasan diskresi eksekutif berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan mendorong keberlanjutan program pemulihan. Namun, perluasan kewenangan ini secara bersamaan membuka ruang bagi distorsi politik, melemahnya mekanisme check and balance, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan anggaran dalam berbagai sektor strategis. Fenomena political budget cycle, hubungan patronase antara aktor politik dan kelompok usaha, serta dominasi eksekutif dalam proses penyusunan APBN menjadi faktor penentu yang memengaruhi arah kebijakan fiskal pada periode tersebut. Sektor-sektor seperti bantuan sosial, pengadaan barang/jasa, dan proyek infrastruktur menunjukkan kerentanan tinggi, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus korupsi yang muncul selama pandemi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis untuk menstabilkan perekonomian, tetapi juga sebagai arena politik yang merefleksikan distribusi kekuasaan, negosiasi kepentingan, dan dinamika institusional. Oleh karena itu, penguatan tata kelola fiskal melalui transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang lebih inklusif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan publik, terutama dalam situasi krisis yang memberikan ruang diskresi lebih besar kepada pemerintah.

Kata kunci: APBN, Ekonomi Politik, Diskresi Eksekutif, Korupsi Anggaran

1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan penting dalam mengarahkan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN idealnya disusun berdasarkan pertimbangan teknokratis dan perencanaan ekonomi yang rasional. Namun dalam praktiknya, proses penyusunan, pembahasan, hingga pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional. Struktur kekuasaan, relasi antara pemerintah dan legislatif, serta kepentingan aktor politik dan kelompok elite sering kali memengaruhi arah kebijakan anggaran negara. Hal tersebut menjadikan APBN bukan hanya dokumen fiskal, tetapi juga arena politik yang mencerminkan interaksi kepentingan di dalam sistem pemerintahan.

Dalam perspektif ekonomi politik, anggaran negara merupakan produk dari tarik-menarik antara kepentingan birokrasi, partai politik, koalisi pemerintahan, serta kelompok ekonomi yang memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal sering kali digunakan sebagai instrumen untuk memperluas legitimasi politik, menjaga stabilitas pemerintahan, atau memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Mekanisme alokasi anggaran, prioritas pembiayaan, hingga besaran belanja sektor tertentu mencerminkan struktur kekuasaan yang bekerja di balik proses formal penyusunan APBN. Dengan demikian, untuk memahami arah kebijakan fiskal Indonesia, analisis perlu dilakukan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dinamika politik yang menyertainya.

Uraian (Triliun Rupiah)	2019	2020	2021
Pendapatan Negara	2.165,	1.699,9	1.743,6
Penerimaan Perpajakan	1.786,4	1.404,5	1.444,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,3	294,1	298,2
Hibah	0,4	1,3	0,9
Belanja Negara	2.461,1	2.739,2	2.750,0
Belanja Pemerintah Pusat	1.634,3	1.975,2	1.954,5
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826,8	763,9	795,5
Keseimbangan Primer	(20,1)	(700,4)	(633,1)
Surplus/Defisit Anggaran	(296,0)	(1.039,2)	(1.006,4)

Tabel 1. Data APBN 2019-2021

Data perkembangan APBN tahun 2019-2021 memperlihatkan perubahan postur fiskal yang signifikan dan sarat implikasi politik. Pada tahun 2019, pendapatan negara mencapai sekitar Rp2.159 triliun sebelum mengalami penurunan tajam pada 2020 menjadi sekitar Rp1.647 triliun. Sebaliknya, belanja negara meningkat dari sekitar Rp1.630 triliun pada 2019 menjadi Rp1.943 triliun pada 2020, dan kembali melonjak hingga melebihi Rp2.200 triliun pada 2021. Kondisi tersebut menyebabkan pelebaran defisit anggaran yang menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah APBN Indonesia. Kombinasi penurunan pendapatan dan peningkatan belanja secara drastis ini bukan hanya mencerminkan tekanan ekonomi akibat pandemi, tetapi juga membuka ruang politik yang lebih luas bagi eksekutif dalam mengelola anggaran negara.

Perubahan drastis dalam struktur anggaran tersebut memberi dampak langsung terhadap dinamika kekuasaan dalam pengelolaan APBN. Melemahnya pendapatan negara dan meningkatnya kebutuhan belanja memberi legitimasi bagi pemerintah untuk memperluas kewenangan fiskal melalui mekanisme refocusing, realokasi, serta penyesuaian anggaran yang lebih fleksibel. Dalam praktiknya, hal ini memperkuat posisi eksekutif dalam proses penganggaran, sementara fungsi pengawasan legislatif menjadi relatif terbatas. Lonjakan belanja negara, khususnya pada sektor perlindungan sosial dan program strategis nasional, juga berpotensi memperkuat basis legitimasi politik pemerintah serta menguntungkan kelompok ekonomi tertentu yang terlibat dalam proyek-proyek besar. Dengan demikian, data APBN periode tersebut secara empiris menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal menjadi instrumen kekuasaan sekaligus cerminan dari kepentingan politik yang mengiringinya.

Melalui dinamika tersebut, kajian mengenai *Dinamika Kekuasaan dan Kepentingan Politik dalam Pengelolaan APBN di Indonesia* menjadi penting untuk memahami bagaimana struktur politik membentuk arah kebijakan fiskal negara. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai relasi kekuasaan, peran aktor politik, dan kepentingan elite dalam memengaruhi struktur dan alokasi APBN. Selain kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ekonomi politik, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dalam memperkuat tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu menjamin pengelolaan anggaran yang berpihak pada kepentingan publik.

2. Kajian Pustaka

Teori Ekonomi Politik

Teori ekonomi politik merupakan kajian yang menempatkan kebijakan ekonomi termasuk kebijakan fiskal dan APBN dalam kerangka relasi kekuasaan, institusi, dan kepentingan politik yang membentuk keputusan negara. Perspektif ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap keputusan ekonomi pada dasarnya tidak pernah bebas nilai, melainkan dibentuk oleh konteks sosial, kepentingan aktor, serta struktur kekuasaan yang ada. Dalam ranah ini, kebijakan anggaran dipandang sebagai produk interaksi antara pemerintah, partai politik, birokrasi, kelompok kepentingan, serta elite ekonomi yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah kebijakan publik. Berbeda dengan pendekatan ekonomi murni yang melihat anggaran sebagai hasil perhitungan rasional dan teknokratis, ekonomi politik justru menyoroti bagaimana keputusan fiskal sering kali mencerminkan preferensi politik, strategi kekuasaan, serta perimbangan kekuatan yang bekerja dalam sistem pemerintahan.

Pemikiran ekonomi politik klasik dari Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx menawarkan dasar teoritis untuk memahami hubungan antara negara, pasar, dan kelas sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi. Smith, misalnya, mengakui bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam penyediaan barang publik, tetapi ia juga menegaskan bahwa penguasa sering dipengaruhi oleh kelompok pedagang dan pemilik modal yang mendorong kebijakan demi keuntungan mereka. Karl Marx kemudian memperluas kritik tersebut dengan menyatakan bahwa negara bekerja sebagai alat kepentingan kelas dominan sehingga kebijakan ekonomi, termasuk anggaran negara, cenderung berpihak pada struktur kapitalis. Pandangan Marxian ini melihat APBN sebagai instrumen distribusi yang kerap menguntungkan elite ekonomi melalui proyek infrastruktur berskala besar, insentif fiskal, atau kebijakan pajak yang lebih longgar bagi kelompok modal kuat. Meskipun bersifat kritis, pemikiran ini memberikan wawasan penting bahwa alokasi APBN dapat menjadi sarana pembentukan dan reproduksi kekuasaan ekonomi politik.

Pada era modern, pemikiran ekonomi politik mengalami perkembangan melalui pendekatan yang menekankan peran negara sebagai aktor otonom. Pemikir seperti Theda Skocpol dan Peter Evans berpendapat bahwa negara tidak selalu menjadi perpanjangan tangan elite ekonomi, melainkan dapat bertindak berdasarkan logika dan kepentingannya sendiri. Negara memiliki kapasitas institusional untuk menentukan arah kebijakan ekonomi, memperluas intervensi melalui anggaran, serta menjalankan program pembangunan sesuai dengan agenda politiknya. Pandangan ini relevan dalam konteks pengelolaan APBN Indonesia, terutama ketika pemerintah memperluas belanja negara pada masa krisis, melakukan refocusing anggaran, dan mengambil langkah fiskal agresif yang memperlihatkan otonomi birokrasi fiskal dan dominasi kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, APBN tidak hanya mencerminkan kepentingan pasar atau elite, tetapi juga strategi politik negara untuk mempertahankan legitimasi dan mengelola stabilitas sosial.

Pendekatan institusional yang dikembangkan oleh Douglass North, Acemoglu, dan Robinson memberikan landasan pemikiran bahwa kualitas institusi politik sangat menentukan arah kebijakan ekonomi. Menurut pendekatan ini, negara dengan institusi inklusif cenderung menghasilkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan publik, sedangkan negara dengan institusi yang ekstraktif lebih mudah terjebak pada kebijakan yang menguntungkan kelompok kecil. Dalam konteks APBN, pendekatan ini menjelaskan bagaimana struktur politik, hubungan eksekutif–legislatif, kekuatan koalisi pemerintah, serta aturan perundangan dapat memengaruhi arah belanja negara, penetapan defisit, dan mekanisme alokasi anggaran. Ketika eksekutif berada pada posisi kuat, kebijakan anggaran lebih mudah diarahkan secara terpusat, sebagaimana terlihat dalam kebijakan fiskal Indonesia pada masa pandemi ketika pemerintah diberi kewenangan fleksibel dalam penyesuaian anggaran.

Teori ekonomi politik juga diperkaya oleh perspektif *public choice* yang dikembangkan oleh James Buchanan, yang melihat politisi sebagai aktor rasional yang mengejar kepentingan pribadi dan elektoral. Dalam teori ini, kebijakan anggaran sering kali dipengaruhi oleh logika mempertahankan kekuasaan sehingga belanja negara terutama belanja sosial atau program populis dapat meningkat menjelang momentum politik tertentu seperti pemilu. Dalam konteks Indonesia, fenomena kenaikan belanja bantuan sosial, percepatan proyek strategis nasional, dan kebijakan fiskal populis dapat dipahami melalui lensa ini. Dengan demikian, teori *public choice* memberikan penjelasan mengenai bagaimana APBN tidak hanya menjadi alat pembangunan, tetapi juga sarana untuk mengelola dukungan politik dan memperkuat posisi pemerintah di hadapan publik.

Melalui beragam pemikiran tersebut, teori ekonomi politik secara keseluruhan memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bahwa pengelolaan APBN merupakan proses yang sangat politis. APBN bukan sekadar perhitungan angka, melainkan representasi dari distribusi kekuasaan, negosiasi kepentingan, dan strategi

politik negara. Keputusan fiskal dipengaruhi oleh interaksi antara aktor politik, elite ekonomi, institusi pemerintahan, kondisi krisis, serta dinamika elektoral. Dengan demikian, teori ekonomi politik menjadi fondasi penting dalam menilai bagaimana kekuasaan dan kepentingan politik mempengaruhi arah, prioritas, dan struktur APBN Indonesia.

Teori Kekuasaan dalam Kebijakan Publik

Kekuasaan merupakan konsep fundamental dalam analisis kebijakan publik karena setiap kebijakan pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara aktor-aktor yang memiliki otoritas dan kepentingan. Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai kekuasaan banyak dijelaskan oleh ilmuwan politik seperti Miriam Budiardjo (2008) yang mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan suatu aktor untuk memengaruhi perilaku aktor lain sehingga bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dalam kebijakan publik, kekuasaan tercermin pada kemampuan pemerintah, terutama eksekutif, dalam menentukan arah, prioritas, dan distribusi sumber daya melalui instrumen anggaran negara. Kekuasaan ini tidak hanya bersifat formal, seperti kewenangan konstitusional yang dipegang presiden dan kementerian terkait, tetapi juga mencakup kemampuan informal yang bersumber dari jaringan politik, dukungan partai, ataupun legitimasi publik.

Konsep kekuasaan dalam kebijakan publik juga dijelaskan oleh Riant Nugroho (2011), yang melihat kebijakan publik sebagai produk relasi kekuatan antar-aktor, bukan sekadar keputusan rasional administratif. Menurut Nugroho, kebijakan publik dapat dipahami sebagai "hasil pertarungan nilai dan kepentingan" yang berlangsung dalam sistem politik, di mana aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar cenderung lebih mampu mengendalikan arah kebijakan. Dalam konteks APBN, hal ini tampak dalam dominasi eksekutif dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran melalui mekanisme perencanaan teknokratis, kewenangan refocusing, serta kekuatan institusional Kementerian Keuangan. Kekuasaan eksekutif diperkuat oleh kapasitas birokrasi fiskal yang sangat besar dibandingkan institusi lain seperti DPR atau pemerintah daerah, sehingga menghasilkan ketimpangan peran dalam pengambilan keputusan anggaran.

Selain itu, teori kekuasaan juga dapat dipahami melalui pendekatan struktural sebagaimana dijelaskan oleh Mas'ood (1994), yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi pada tingkat individu, tetapi juga tertanam dalam institusi dan struktur politik yang membentuk perilaku aktor. Dalam pengelolaan anggaran, struktur institusional Indonesia memberikan posisi dominan kepada pemerintah pusat melalui sistem perencanaan yang terpusat, mekanisme penganggaran yang bersifat hirarkis, serta kapasitas fiskal yang terkonsentrasi di pusat. Situasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "power asymmetry" atau ketimpangan kekuasaan antara pusat dan daerah, serta antara eksekutif dan legislatif dalam proses politik anggaran. Ketimpangan tersebut memungkinkan eksekutif mengarahkan kebijakan fiskal sesuai agenda politik atau strategi pembangunan tertentu tanpa kontrol yang seimbang dari lembaga lainnya.

Dalam literatur administrasi publik Indonesia, kekuasaan juga dibahas dalam kaitannya dengan governance. Menurut Sedarmayanti (2012), kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan menyebar melalui berbagai aktor, tetapi tetap dipengaruhi oleh struktur dominan yang menentukan siapa yang memiliki otoritas tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan APBN, otoritas tersebut terletak pada eksekutif, terutama Presiden, Menteri Keuangan, dan kementerian teknis terkait, yang memiliki kewenangan luas dalam menetapkan kebijakan makro fiskal, menetapkan pagu anggaran, serta melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Walaupun DPR memiliki kewenangan budgeting, secara praktik kekuasaan legislatif sering kali lebih bersifat deliberatif daripada menentukan, karena DPR hanya dapat menyetujui atau menolak usulan anggaran, bukan menyusun alternatif secara menyeluruh.

Teori kekuasaan dalam kebijakan publik juga dapat dilihat dari pendekatan relasional yang menekankan pentingnya jaringan politik dan kepentingan elite dalam menentukan kebijakan anggaran. Penelitian Aspinall & Berenschot (2019) tentang patronase politik di Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali terdistribusi melalui hubungan patron-klien yang memengaruhi penentuan alokasi anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan belanja daerah. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari otoritas formal, tetapi juga dari hubungan informal yang bekerja di dalam sistem politik. Dengan demikian, pengelolaan APBN pada praktiknya merupakan perwujudan dari bagaimana kekuasaan didistribusikan, dinegosiasikan, dan digunakan oleh aktor-aktor politik dan birokrasi dalam kerangka institusional Indonesia.

Berdasarkan beragam pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kekuasaan dalam kebijakan publik memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana pengelolaan APBN sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antara aktor negara, legislatif, birokrasi, dan elite politik. Kekuasaan bukan hanya menentukan proses penyusunan anggaran, tetapi juga memengaruhi cara anggaran dialokasikan, diprioritaskan, dan digunakan sebagai

instrumen politik. Dalam konteks ini, analisis ekonomi politik APBN harus berangkat dari pemahaman bahwa kekuasaan merupakan faktor utama yang menentukan struktur dan arah kebijakan fiskal Indonesia.

Teori Kepentingan Politik dan Elite

Teori kepentingan politik dan elite menjelaskan bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal seperti APBN, tidak lahir dari proses teknokratis semata, tetapi merupakan hasil interaksi antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, para ilmuwan politik melihat bahwa kepentingan aktor politik sering kali menjadi faktor dominan yang memengaruhi bagaimana anggaran negara dialokasikan. Menurut Budiardjo (2008), kepentingan politik adalah orientasi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh aktor politik melalui penggunaan kewenangan dan sumber daya negara. Kepentingan tersebut dapat berupa upaya mempertahankan kekuasaan, memperluas dukungan elektoral, memperkuat legitimasi politik, atau mengamankan dukungan dari kelompok strategis seperti pengusaha atau birokrasi. Dalam kerangka ini, APBN menjadi instrumen penting karena memungkinkan aktor politik mendistribusikan sumber daya kepada kelompok tertentu demi kepentingannya.

Sementara itu, teori elite memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai bagaimana kekuasaan dalam negara cenderung terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki posisi strategis dalam struktur politik dan ekonomi. Mas'ood (1994) menegaskan bahwa elite politik dan elite ekonomi sering kali membentuk aliansi yang menentukan arah kebijakan negara, termasuk kebijakan fiskal. Dalam kondisi seperti ini, APBN dapat mencerminkan kepentingan elite tertentu melalui alokasi belanja untuk proyek-proyek strategis, pemberian insentif fiskal kepada kelompok usaha besar, atau pembiayaan kebijakan yang mendukung stabilitas politik bagi aktor penguasa. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan fiskal di Indonesia yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur berskala besar, program-program strategis nasional, atau pemberian stimulus kepada sektor usaha tertentu yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Kepentingan elite dan praktik patronase politik juga dijelaskan oleh Aspinall dan Berenschot (2019), yang mengidentifikasi bahwa hubungan patron–klien memainkan peran penting dalam proses politik di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Mereka menjelaskan bahwa anggaran negara sering kali digunakan sebagai alat patronase, di mana sumber daya publik dialokasikan untuk mempertahankan dukungan politik melalui distribusi proyek, program bantuan sosial, atau belanja publik yang menguntungkan kelompok tertentu. Dalam konteks tersebut, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai alat untuk mengelola stabilitas politik dan mempertahankan jaringan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat melalui pola alokasi anggaran yang mengutamakan program yang memiliki dampak elektoral tinggi, terutama pada tahun-tahun politik.

Selain itu, perspektif kepentingan politik dalam kebijakan publik juga dijelaskan oleh Riant Nugroho (2011), yang menyatakan bahwa setiap kebijakan publik merupakan hasil kontestasi antara aktor-aktor yang berupaya memengaruhi keputusan sesuai dengan tujuan politiknya. Dalam pengelolaan APBN, kontestasi ini muncul dalam bentuk negosiasi antara eksekutif dan legislatif, tarik-menarik kepentingan fraksi politik, serta masuknya kelompok kepentingan bisnis yang berupaya memengaruhi alokasi anggaran untuk sektor tertentu. Nugroho menekankan bahwa kepentingan politik tidak hanya hadir dalam proses formulasi kebijakan, tetapi juga dalam implementasi anggaran, di mana aktor-aktor tertentu dapat memperoleh keuntungan melalui proyek pemerintah atau penyaluran program yang ditujukan kepada basis pendukung mereka.

Secara keseluruhan, teori kepentingan politik dan elite memberikan landasan konseptual yang penting untuk memahami bahwa APBN tidak hanya mencerminkan kebutuhan ekonomi nasional, tetapi juga merupakan instrumen yang digunakan oleh aktor politik dan elite ekonomi untuk mencapai tujuan mereka. APBN dapat berfungsi sebagai alat distribusi kekuasaan, instrumen patronase, sarana memperkuat koalisi politik, atau bahkan strategi memenangkan dukungan elektoral. Dengan demikian, analisis terhadap pengelolaan APBN harus memperhatikan bagaimana kepentingan politik, hubungan elite, dan praktik patronase mempengaruhi proses penyusunan, alokasi, hingga implementasi anggaran negara.

Political Budget Cycle

Teori *Political Budget Cycle* (PBC) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal suatu negara sering kali mengalami perubahan yang bersifat politis menjelang periode kontestasi pemilu. Pemerintah, sebagai aktor yang berkepentingan mempertahankan kekuasaan atau memperluas dukungan elektoral, cenderung menyesuaikan belanja negara, pendapatan negara, dan program distribusi publik untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. PBC pertama kali diperkenalkan oleh Nordhaus (1975), yang mengemukakan bahwa petahana memiliki insentif untuk melakukan manipulasi ekonomi makro menjelang pemilu, terutama melalui peningkatan belanja publik dan kebijakan populis lainnya agar memperoleh keuntungan elektoral. Teori ini

kemudian berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memiliki pola belanja fiskal dan politik anggaran yang sangat dipengaruhi oleh dinamika elektoral.

Dalam konteks Indonesia, fenomena *political budget cycle* terlihat dari kecenderungan pemerintah meningkatkan belanja pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat menjelang pemilu atau tahun politik, seperti belanja bantuan sosial, subsidi, dana desa, dan program padat karya. Berbagai studi di Indonesia menunjukkan adanya pola kenaikan signifikan dalam belanja bantuan sosial pada tahun-tahun politik, yang dapat diinterpretasikan sebagai strategi untuk memperkuat dukungan politik pemerintah melalui kebijakan populis. Di sisi lain, pemerintah juga cenderung mempercepat pembangunan infrastruktur strategis untuk memperkuat legitimasi politik dan meningkatkan citra keberhasilan pembangunan. Menurut Hamzah (2013) dan penelitian-penelitian kebijakan fiskal lokal, PBC di Indonesia juga muncul pada level daerah, di mana kepala daerah meningkatkan belanja modal, hibah, atau belanja sosial menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) demi mempertahankan dukungan politik.

Secara teoretis, PBC terjadi karena adanya informasi asimetris antara pemerintah dan pemilih. Pemerintah memiliki pengetahuan yang lebih besar mengenai kondisi fiskal negara sehingga dapat menggunakan kebijakan anggaran untuk memengaruhi persepsi publik tanpa harus menanggung konsekuensi jangka pendek. Misalnya, peningkatan belanja sosial atau subsidi pada tahun politik sering dianggap sebagai bentuk perhatian pemerintah, padahal dapat berdampak pada pelebaran defisit atau penurunan kualitas fiskal di tahun berikutnya. Asimetri informasi inilah yang memungkinkan manipulasi anggaran bersifat temporer, tetapi memiliki efek signifikan pada perilaku pemilih. Dalam banyak kasus, pemilih tidak memeriksa dampak fiskal jangka panjang, tetapi hanya merespons manfaat jangka pendek dari program pemerintah.

Dalam praktiknya, PBC di Indonesia tidak hanya dikendalikan oleh aktor eksekutif, tetapi juga melibatkan DPR dan partai-partai koalisi yang memiliki kepentingan politik menjelang pemilu. Negosiasi dalam pembahasan anggaran sering kali memiliki dimensi elektoral, terutama terkait besaran belanja daerah, dana alokasi khusus, atau program-program sektoral yang berpotensi memperkuat basis dukungan partai. Dengan demikian, PBC bukan hanya strategi eksekutif untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga mekanisme politik yang melibatkan aktor legislatif dan elite partai yang berkepentingan mendapatkan manfaat elektoral melalui instrumen APBN. Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena PBC menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya mencerminkan kebutuhan ekonomi, tetapi berfungsi sebagai alat politik yang digunakan aktor-aktor berkuasa untuk mempertahankan, memperluas, atau mengamankan posisi mereka dalam sistem politik.

Dengan memahami teori PBC, analisis terhadap APBN Indonesia menjadi lebih komprehensif karena mampu menjelaskan mengapa terjadi peningkatan belanja sosial, percepatan program strategis nasional, atau kebijakan fiskal populis pada periode tertentu. Teori ini juga penting untuk menilai sejauh mana kebijakan anggaran diarahkan oleh kepentingan publik atau kepentingan elektoral aktor politik. Oleh karena itu, PBC merupakan kerangka analisis yang relevan dalam mengkaji dinamika kekuasaan dan kepentingan politik dalam pengelolaan APBN Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan data fiskal dan fenomena politik yang muncul pada tahun-tahun menjelang kontestasi politik nasional maupun daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sebagai pendekatan utama dalam menganalisis dinamika kekuasaan dan kepentingan politik dalam pengelolaan APBN di Indonesia. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan konsep, teori, serta temuan empiris yang telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, maupun dokumen anggaran pemerintah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai perspektif akademik dan temuan empiris secara komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data primer.

Proses penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan literatur, yaitu mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian, terutama yang membahas ekonomi politik, kekuasaan dalam kebijakan publik, kepentingan elite, *political budget cycle*, serta pengelolaan APBN. Literatur yang digunakan mencakup publikasi nasional maupun internasional, serta dokumen resmi pemerintah seperti data realisasi APBN tahun 2019-2021 yang digunakan sebagai materi pendukung dalam analisis fenomena fiskal terkini.

Tahap kedua adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang telah terkumpul. Pada tahap ini, peneliti menelaah isi setiap sumber secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, atau konsep penting yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan mengekstraksi gagasan utama dari teori kekuasaan, teori kepentingan elite, serta konsep *political budget cycle*, kemudian menghubungkannya dengan berbagai temuan

empiris terkait praktik pengelolaan APBN di Indonesia. Teknik ini memungkinkan peneliti melihat keterkaitan antara teori ekonomi politik dan dinamika politik anggaran dalam konteks Indonesia.

Tahap ketiga adalah sintesis literatur, yaitu menggabungkan temuan dari berbagai sumber ke dalam kerangka analisis yang utuh. Pada tahap ini, peneliti membangun argumentasi mengenai bagaimana kekuasaan politik, kepentingan elite, dan siklus politik memengaruhi kebijakan anggaran negara. Sintesis ini kemudian digunakan untuk menyusun bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian. Hasil literatur terdahulu dijadikan dasar untuk menampilkan pola dan kecenderungan yang telah teridentifikasi, sementara pembahasan diarahkan untuk memberikan interpretasi politik terhadap fenomena tersebut, terutama dalam konteks realisasi APBN periode 2019-2021.

Metode studi literatur dalam penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan temuan baru berbasis data primer, tetapi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ekonomi politik APBN melalui integrasi teori dan hasil penelitian sebelumnya. Jadi, metode ini mampu menghasilkan analisis komprehensif yang menempatkan APBN tidak hanya sebagai dokumen fiskal, tetapi juga sebagai produk dari interaksi kekuasaan dan kepentingan politik dalam sistem pemerintahan Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian yang diperoleh dari literatur utama menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam periode 2019–2021 memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada masa pandemi Covid-19. Jurnal tersebut menekankan bahwa APBN digunakan sebagai instrumen utama pemerintah dalam merespons kondisi krisis, sekaligus sebagai alat pemulihan ekonomi melalui penyesuaian belanja dan pembiayaan negara. Ketika pandemi menekan aktivitas ekonomi secara drastis, pemerintah melakukan realokasi, refocusing, serta perluasan belanja untuk menopang sektor-sektor yang paling terdampak.

Salah satu temuan penting dalam jurnal tersebut adalah bahwa pada tahun 2020 pendapatan negara mengalami penurunan signifikan karena perlambatan ekonomi. Namun, pemerintah memilih untuk mempertahankan dan bahkan menaikkan belanja negara secara substansial sebagai bagian dari kebijakan fiskal ekspansif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat, menguatkan jaring pengaman sosial, dan menstimulasi aktivitas ekonomi melalui intervensi belanja publik. Kenaikan belanja negara mencakup sektor kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, infrastruktur, dan dukungan terhadap dunia usaha melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Literatur juga menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian besar terhadap APBN melalui perubahan kebijakan fiskal darurat yang memungkinkan defisit melebihi batas maksimal 3% PDB. Kebijakan ini dianggap penting karena memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk menangani pandemi. Dengan meningkatnya kebutuhan belanja negara dan berkurangnya pendapatan, pembiayaan defisit dilakukan dengan menerbitkan surat utang, pinjaman, serta instrumen pembiayaan lainnya. Pengelolaan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui strategi yang disesuaikan agar risiko fiskal tetap terkendali.

Selain itu, jurnal tersebut menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah pandemi, penerimaan negara masih bergantung besar pada pajak. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan perpajakan dilakukan, termasuk reformasi administrasi, perluasan basis pajak, serta pemberlakuan kebijakan tax amnesty untuk mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dan dunia usaha. Meskipun tax amnesty tidak sepenuhnya mencapai target penerimaan, kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan transparansi pelaporan harta dan memperluas basis potensial penerimaan negara di masa mendatang.

Dari sisi pengeluaran, jurnal literatur menekankan bahwa pemerintah menggunakan belanja negara sebagai pendorong pemulihan ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah terbukti mampu menjaga tingkat konsumsi, memperkuat sektor kesehatan, dan mengurangi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Proses pemulihan mulai terlihat pada 2021, ditandai dengan meningkatnya penerimaan negara, membaiknya konsumsi, serta mulai stabilnya aktivitas ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dari literatur ini menunjukkan bahwa pemerintah dinilai berhasil mengatasi tekanan ekonomi akibat pandemi melalui kebijakan fiskal yang responsif dan adaptif. APBN berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang mampu meredam kontraksi, menjaga daya beli masyarakat, serta mempersiapkan fondasi pemulihan nasional. Kebijakan fiskal selama 2019–2021 dianggap berhasil melindungi masyarakat, mempertahankan ketahanan sistem kesehatan, serta mendorong bangkitnya kembali aktivitas ekonomi di tengah situasi yang sangat menantang.

Pembahasan

Analisis Politik dalam Pengelolaan APBN Indonesia 2019–2021

Pengelolaan APBN Indonesia pada periode 2019–2021 menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi teknis, tetapi juga oleh konfigurasi politik, dinamika kekuasaan, hubungan elite, dan strategi mempertahankan legitimasi pemerintah. Ketika ditelaah menggunakan perspektif ekonomi politik, terlihat bahwa APBN dalam masa pandemi memainkan fungsi ganda: sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus instrumen politik yang digunakan pemerintah untuk mengelola dukungan publik dan mempertahankan stabilitas kekuasaan.

1. Dominasi Kekuasaan Eksekutif dalam Pengelolaan APBN

Dalam periode 2019–2021, pengelolaan APBN memperlihatkan adanya peningkatan dominasi kekuasaan eksekutif dalam menentukan prioritas dan arah kebijakan fiskal, terutama setelah pemerintah menetapkan status pandemi sebagai kondisi darurat nasional. Pengaturan mengenai refocusing dan realokasi anggaran memungkinkan pemerintah untuk melakukan perubahan signifikan pada struktur APBN tanpa melalui proses musyawarah yang panjang dengan DPR. Situasi kedaruratan tersebut memberikan ruang legitimasi bagi eksekutif untuk mengambil keputusan fiskal secara cepat dan sentralistik, namun dari perspektif ekonomi politik, kondisi ini menunjukkan berkurangnya fungsi check and balance dalam mekanisme penganggaran. Dengan kewenangan yang lebih besar, eksekutif dapat mengarahkan anggaran sesuai agenda yang dianggap strategis, sehingga proses formulasi APBN menjadi lebih executive-driven dan kurang melibatkan dinamika deliberatif antara lembaga negara.

2. Belanja Sosial, Legitimasi Politik, dan Patronase

Peningkatan signifikan belanja sosial selama pandemi tidak hanya mencerminkan strategi ekonomi untuk menjaga daya beli dan melindungi kelompok rentan, tetapi juga menunjukkan karakter politik dari kebijakan fiskal. Belanja bantuan sosial yang besar dan bersifat langsung kepada masyarakat memiliki nilai politis yang sangat tinggi, karena secara praktis memperkuat persepsi bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap kondisi rakyat. Model distribusi bantuan semacam ini sering kali menjadi instrumen patronase politik, di mana negara memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekaligus memperoleh kenaikan legitimasi dan kepercayaan publik. Dalam konteks pandemi, bantuan sosial memang dibutuhkan, tetapi penyalurannya tidak lepas dari pertimbangan politik jangka panjang, terutama dalam membangun citra pemerintahan yang efektif dan responsif. Oleh karena itu, belanja sosial dapat dipahami sebagai kebijakan dengan muatan ekonomi sekaligus strategi politik yang memperkuat hubungan emosional antara negara dan warga.

3. Proyek Infrastruktur dan Kepentingan Elite Ekonomi

Keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek-proyek strategis nasional (PSN) meskipun kondisi fiskal sedang tertekan menunjukkan adanya keterkaitan antara arah kebijakan fiskal dan kepentingan elite ekonomi. Proyek infrastruktur berskala besar secara historis sering melibatkan aktor bisnis dengan kekuatan modal tinggi, sehingga keberlanjutan proyek tersebut pada masa pandemi mengindikasikan adanya hubungan saling menguntungkan antara pemerintah dan kelompok usaha tertentu. Dalam perspektif ekonomi politik, kelanjutan proyek infrastruktur bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan strategi menjaga stabilitas hubungan politik-ekonomi dengan kelompok elite yang memiliki peran penting dalam menopang kekuasaan. Pengalokasian anggaran infrastruktur yang relatif stabil selama masa pandemi memperlihatkan bahwa meskipun pendapatan negara menurun, komitmen pemerintah terhadap kepentingan aktor ekonomi besar tetap dipertahankan demi kontinuitas dukungan politik dan ekonomi.

4. Indikasi Political Budget Cycle (PBC) dalam Struktur Belanja APBN

Analisis terhadap pola belanja APBN 2020–2021 menunjukkan dinamika yang konsisten dengan teori Political Budget Cycle (PBC), yaitu kecenderungan pemerintah meningkatkan belanja yang bernuansa populis pada periode konsolidasi kekuasaan atau menjelang kontestasi politik. Belanja sosial yang tetap tinggi pada 2021 meskipun kondisi pandemi mulai membaik mencerminkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal tersebut memiliki dimensi politik selain dimensi ekonomi. Dalam kerangka PBC, peningkatan belanja publik yang langsung menyentuh masyarakat sering dimanfaatkan sebagai alat pembentukan citra positif pemerintah, sehingga dapat meningkatkan dukungan politik. Dengan Indonesia memasuki periode awal menuju Pemilu 2024, belanja sosial dan stimulus fiskal yang besar dapat dibaca sebagai bagian dari strategi mempertahankan stabilitas elektoral dan meminimalkan potensi turunnya legitimasi pemerintah di tengah situasi ekonomi yang masih rapuh.

5. Harmoni Eksekutif–Legislatif dan Minimnya Fungsi Pengawasan

Pembahasan APBN selama 2019–2021 juga menunjukkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif berada dalam fase yang sangat harmonis, sehingga proses persetujuan anggaran berlangsung cepat dan minim perdebatan substansial. Dominasi koalisi besar di parlemen mengakibatkan berkurangnya tekanan politik terhadap pemerintah dalam mengajukan dan mengubah struktur APBN. Dengan koalisi yang luas dan loyal, DPR memiliki insentif politik yang lebih kecil untuk melakukan kritik mendalam terhadap keputusan fiskal pemerintah. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif, sehingga kebijakan APBN semakin dipengaruhi oleh preferensi dan agenda pemerintah. Dalam ekonomi politik, situasi ini disebut *executive-centric budgeting*, di mana posisi legislatif sebagai institusi pengimbang melemah, dan kekuasaan eksekutif dalam mengatur alokasi anggaran menjadi semakin besar.

6. APBN sebagai Instrumen Kekuasaan dalam Masa Krisis

Krisis pandemi tidak hanya menjadi tantangan ekonomi dan kesehatan, tetapi juga membuka ruang bagi pemerintah untuk memperkuat posisi politiknya melalui kebijakan fiskal. APBN menjadi alat penting dalam menjaga legitimasi politik pemerintah di mata masyarakat. Program-program seperti Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan UMKM, dan subsidi lainnya berfungsi sebagai sarana menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola krisis. Dari perspektif ekonomi politik, tindakan ini merupakan bentuk legitimasi yang bersumber dari kebijakan publik (*policy-based legitimation*). Pemerintah memperoleh keuntungan politik ketika masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan fiskal, sehingga persepsi positif terhadap pemerintah meningkat. Dalam konteks ini, APBN bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga alat politik yang kuat dalam mempertahankan stabilitas kepemimpinan selama masa krisis.

7. Aspek Korupsi dalam Pengelolaan APBN: Diskresi Eksekutif, Patronase, dan Risiko Penyalahgunaan Anggaran

Dalam hal pengelolaan APBN 2019–2021, perluasan kewenangan eksekutif melalui mekanisme refocusing dan realokasi anggaran selama pandemi tidak hanya memperlihatkan dominasi negara dalam kebijakan fiskal, tetapi secara teoretis juga membuka ruang korupsi yang lebih besar, sebagaimana dijelaskan oleh teori public choice yang menekankan bahwa aktor politik bertindak rasional mengejar kepentingan elektoral maupun material mereka sendiri (Buchanan & Tullock). Mekanisme fiskal darurat yang membuat belanja negara melonjak signifikan, sementara pengawasan DPR melemah akibat situasi krisis, menciptakan struktur kebijakan yang sejalan dengan konsep ekstraktivitas institusi dari Acemoglu & Robinson, yaitu ketika elite politik memiliki insentif kuat memanfaatkan fleksibilitas fiskal untuk memperkuat jaringan patronase dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini diperparah oleh temuan Aspinall & Berenschot tentang patronase politik di Indonesia, di mana alokasi anggaran khususnya pada proyek bernilai besar seperti infrastruktur dan belanja daerah sering kali dipengaruhi oleh hubungan informal antara elite politik dan pengusaha. Pada masa pandemi, fenomena serupa tampak ketika proyek strategis nasional tetap dipertahankan meski pendapatan negara menurun, mengindikasikan adanya kepentingan politik-ekonomi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan kelompok usaha besar. Belanja sosial yang meningkat drastis juga tidak hanya menjadi instrumen stabilisasi ekonomi, tetapi sekaligus memperkuat legitimasi politik pemerintah, sesuai dengan konsep patronase yang melihat bantuan publik sebagai sarana memperkuat dukungan masyarakat. Realitas empiris turut mempertegas pola korupsi ini, seperti kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 pada 2020 yang menunjukkan bagaimana aktor politik dapat memanfaatkan alokasi APBN darurat melalui mark-up harga dan pembagian proyek kepada rekan kelompoknya. Selain itu, berbagai kasus pengadaan alat kesehatan di masa pandemi yang dilakukan melalui penunjukan langsung dan minim verifikasi mencerminkan karakter korupsi dalam pengadaan publik ketika transparansi dilemahkan demi percepatan. Dengan demikian, berdasarkan teori ekonomi politik, patronase, dan public choice, serta didukung oleh pola diskresi fiskal yang sangat besar dalam APBN 2019–2021, dapat disimpulkan bahwa struktur politik pada periode tersebut membentuk kondisi yang bukan hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga rawan distorsi koruptif akibat sentralisasi kekuasaan eksekutif, lemahnya pengawasan, dan kuatnya insentif politis dalam distribusi anggaran negara.

4. Kesimpulan

Pengelolaan APBN Indonesia pada periode 2019–2021 memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan, relasi politik, dan kepentingan elite yang bekerja dalam sistem pemerintahan. Lonjakan belanja negara dan perluasan diskresi eksekutif melalui mekanisme refocusing dan realokasi selama pandemi memang efektif menjaga stabilitas ekonomi, namun pada saat yang sama menciptakan struktur fiskal

yang sangat politis dan rentan terhadap distorsi. Pengawasan legislatif yang melemah, hubungan patronase antara aktor politik dan kelompok usaha, serta strategi pemerintah dalam mempertahankan legitimasi melalui belanja sosial dan proyek strategis, semuanya menunjukkan bahwa APBN berfungsi bukan hanya sebagai alat ekonomi tetapi juga instrumen politik. Temuan ini diperkuat oleh berbagai teori, seperti public choice yang menekankan kepentingan aktor politik, patronase yang menjelaskan hubungan informal elite, serta konsep institusi ekstraktif Acemoglu & Robinson yang menggambarkan bagaimana diskresi fiskal yang besar dapat membuka celah korupsi. Kasus nyata seperti korupsi bansos Covid-19 dan penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan menegaskan bahwa fleksibilitas fiskal pada masa krisis dapat dimanfaatkan oleh aktor tertentu untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, APBN dalam periode ini menggambarkan interaksi erat antara kebijakan ekonomi, kepentingan politik, dan risiko penyalahgunaan anggaran yang perlu dikelola secara serius untuk menjaga integritas tata kelola fiskal Indonesia.

Referensi

1. Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Publishers.
2. Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
3. Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
4. Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent*. University of Michigan Press.
5. Dahl, R. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale University Press
6. Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton University Press.
7. Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge*. Pantheon Books.
8. Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge*. Pantheon Books.
9. Hamzah, Ardi. (2013). "Political Budget Cycle dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.
10. Marx, Karl. (1867). *Capital: A Critique of Political Economy*. Penguin Classics.
11. Mas'ood, Mohtar. (1994). *Ilmu Politik dan Paradigma Baru*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
12. Nordhaus, W. (1975). "The Political Business Cycle." *The Review of Economic Studies*, 42(2), 169–190.
13. North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press.
14. Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
15. Ricardo, D. (1817). *Principles of Political Economy and Taxation*.
16. Rosi Nurmayasari, R. K. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DALAM PENGELOLAAN APBN DI INDONESIA. *Repository UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon*, 1-13.
17. Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
18. Skocpol, T. (1985). *Bringing the State Back In*. Cambridge University Press.
19. Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*.